BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan yang signifikan sebagai dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, reformasi yang dilakukan meliputi mekanisme keuangan dan aspek administratif pemerintahan. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk secara mandiri menangani berbagai urusan di daerahnya melalui pembentukan otonomi daerah, namun tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Agar dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik, pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien (Sasana 2009:5).

Pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya membutuhkan berbagai sumber pendanaan. Sumber pendapatan tersebut meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah: berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah (penyertaan modal daerah), pendapatan lain lain yang sah.
2. Penerimaan Transfer: mencakup transfer antar daerah dan transfer pemerintah pusat.

3. Pendapatan Lain yang Sah: mencakup dana darurat, bantuan hibah, serta lain-lain yang sah (Daerah dan Negeri 2019:17).

Tabel 1. 1

Ringkasan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Penerimaan	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	822.243.065.500
2.	Pendapatan Transfer	1.499.340.573.250
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.628.000.000
Jumlah Penerimaan		2.324.211.638.750

Sumber: Website Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022

Data ini menggambarkan komposisi penerimaan daerah dengan total jumlah penerimaan sebesar Rp2.324.211.638.750. Dari total penerimaan tersebut, terdapat tiga jenis sumber utama. Sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer dengan jumlah mencapai Rp1.499.340.573.250 atau sekitar 64,5% dari total penerimaan. Adapun Pendapatan Asli Daerah menyumbang sebesar Rp822.243.065.500, atau sekitar 35,4% dari total penerimaan daerah. Angka ini menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan daerah, menandakan potensi kemandirian finansial daerah yang cukup baik. Dan Lain-lain Pendapatan yang Sah menjadi penyumbang dengan jumlah terkecil, yaitu Rp2.628.000.000, atau kurang dari 0,1% dari total penerimaan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwasanya “pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwasanya “(1) pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusannya, yang dilengkapi dengan dukungan dana, fasilitas, dan personel berdasarkan prinsip desentralisasi. (2) alokasi dana yang sesuai dengan prinsip dekonsentrasi juga melengkapi tugas-tugas pemerintahan yang didelegasikan kepada gubernur”. Keefektifan pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan PAD, yang pada akhirnya dapat mendorong kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah meningkat seiring dengan kemakmuran daerah, sehingga menjadi kurang bergantung pada pemerintah pusat.

Informasi berikut menunjukkan bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin direalisasikan pada periode 2023:

Tabel 1. 2
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Jenis Penerimaan	2023		
	Target	Realisasi	%
Pajak Daerah	560,706,706,000.00	307,458,966,092.65	54.83
Retribusi Daerah	57,523,220,000.00	36,852,796,059.00	64.07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan	39,521,878,692.00	30,408,079,044.00	76.94
Lain-Lain PAD yang Sah	162,954,608,808.00	91,383,454,613.35	56.08
Jumlah PAD	820,706,413,500.00	466,103,295,809.00	56.79

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin 2023

Informasi tersebut, menunjukkan penyumbang terbesar pendapatan daerah ialah pajak daerah. Pajak ialah salah satu bentuk komitmen masyarakat kepada negara selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembayar pajak tidak secara langsung memperoleh manfaat dari pajak yang diwajibkan ini. Uang yang terkumpul dari pajak dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan negara, termasuk dana keluar yang memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat secara umum (Mardiasmo 2009:1). Dalam skala yang lebih kecil, pajak yang pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah menjadi hal yang wajib dipenuhi bagi individu maupun entitas usaha kepada pemerintah daerah

tanpa menerima imbalan langsung yang setara. Pemungutan ini sifatnya wajib dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang ada. Dana yang diperoleh dari pajak daerah dimanfaatkan untuk mendukung operasional pemerintahan serta pembangunan wilayah setempat (Yani 2004:45). Kebijakan ini dirancang berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara umum serta mendukung strategi keuangan pemerintah.

Pajak merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembentukan negara dan masyarakat yang lebih baik. Menurut Brautigam, Fjeldstad, dan Moore (2009:3), dalam bukunya *Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent*, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi negara di mata warganya. Pengelolaan pajak yang efektif dapat meningkatkan kapasitas negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang krusial, termasuk pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, Gordon (2010:125) menyatakan bahwa di negara berkembang, pajak daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian daerah, mengingat keterbatasan sumber daya fiskal. Oleh karena itu, pajak daerah dapat menjadi pendorong kemandirian fiskal yang mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan wilayah pemungutannya, yakni pemungutan oleh pemerintah provinsi dan pemungutan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pajak provinsi dikelola pemerintah tingkat provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota dikelola pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota (Prakosa 2005:3). Di tingkat kabupaten/kota, sumber pendapatan pajak mencakup berbagai jenis pungutan, seperti pajak atas hiburan, restoran, hotel, reklame, parkir, penerangan jalan, Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sarang burung wallet (Prakosa 2005:3). Penerimaan pajak daerah menjadi sebuah pilar utama yang mendukung pemerintah daerah dalam mendanai bermacam-macam program dan menjalankan tanggung jawabnya (Prakosa 2005:34). Sehingga dari kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pajak serta memaksimalkan penerimaannya, tingkat kemandirian pada daerah dapat dinilai.

Pajak daerah berpotensi besar untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dikelola secara baik, berbagai jenis pajak daerah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan layanan publik di wilayah tersebut. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber pajak yang telah ada serta mengeksplorasi peluang pajak baru yang belum dimanfaatkan, pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini secara langsung berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Selain upaya pemerintah dalam mengelola pajak, partisipasi masyarakat melalui kesadaran membayar pajak juga menjadi faktor

penting dalam memenuhi sasaran penerimaan yang telah direncanakan. Keadaan di atas sejalan dengan yang Allah firmankan pada Q.S. An Nisa/4 : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu,.....”

Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa mengerjakan seluruh perintah-Nya serta meninggalkan semua larangann-Nya merupakan hal yang wajib dipatuhi oleh tiap manusia. Tidak hanya itu, manusia juga diperintahkan untuk menaati utusan Allah SWT yakni Rasulullah SAW. Artinya ketaatan kepada Rasulullah berarti juga menaati Allah yang mengutusnyanya. Selanjutnya, manusia juga diharuskan menaati ulil amri atau pemimpin, termasuk pemerintah. Mematuhi kewajiban untuk membayar pajak merupakan salah satu wujud kepatuhan terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurut teori *development from below* milik Davey (1988) pada bukunya Prakosa (2005:24), umumnya Masyarakat bisa merasakan secara langsung dampak dari Pembangunan yang dilakukan di wilayahnya, sehingga mereka lebih bersedia memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah daerah dibandingkan kepada pemerintah pusat.

Pendapatan daerah Kota Banjarmasin sebagian besar berasal dari tiga jenis pajak daerah, yaitu pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan. Penginapan, motel, pondok wisata, gedung khusus tamu, rumah tempat bermalam, serta tempat penginapan lainnya, termasuk rumah kos dengan kapasitas melebihi sepuluh kamar, merupakan beberapa contoh jenis layanan penginapan yang dikenakan pajak hotel. Pajak hotel sangat penting untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengungkapkan bahwasanya “pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan”. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 25 “hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”. Pajak hiburan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peluang besar untuk berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan industri jasa dan pariwisata dalam rencana pembangunan daerah.

Pajak penerangan jalan juga mempunyai peranan penting dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak ini dipungut atas penggunaan listrik, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk membayar biaya penerangan jalan di daerah terkait (Prakosa 2005:80). Sebagai bagian dari sumber pendapatan, pajak penerangan jalan memiliki peranan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, pendapatan yang diperoleh dari pajak ini harusnya mampu mendorong pemerintah agar lebih fokus dalam mengoptimalkan PAD dan memperkuat pengawasan

terhadap pengelolaan pajak penerangan jalan, guna mencegah pelanggaran yang bisa menghambat kemajuan daerah (Purba dan Ginting 2016:26).

Berbagai jenis pajak yang telah disebutkan menunjukkan besarnya potensi pajak dalam mendukung kemajuan pembangunan di suatu daerah. Mengkaji potensi PAD merupakan langkah yang bisa diambil oleh pemerintah daerah untuk memperbesar pendapatan daerah (Prakosa 2005:144). Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan perpajakan yang menetapkan landasan hukum demi memastikan keadilan antara negara dan masyarakat. Keadilan dalam hal perundang-undangan tercermin dalam penerapan pajak yang merata dan adil, ditetapkan berdasarkan kapasitas masing-masing individu. Selain itu, keadilan pada pelaksanaan pajak juga mencakup hak untuk menyampaikan keberatan oleh wajib pajak, menunda pembayaran, serta mengajukan banding melalui Pengadilan Pajak. Sejalan dengan hal ini Bahl, Martinez-Vazquez, dan Youngman (2008:89) menyatakan bahwa sistem perpajakan yang adil dan transparan adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat legitimasi fiskal pemerintah di mata masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam Q.S. An-Nisa/4 : 58 Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah diuraikan tersebut, menarik untuk diteliti mengenai analisis dampak penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin tahun 2015-2023. Maka dari itu, dibutuhkan studi lanjutan untuk mendalami hal ini guna menggali informasi yang lebih komprehensif untuk memperjelas informasi sebelum dan sesudah adanya informasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang ada, sehingga peneliti bisa mengambil rumusan masalah, yaitu :

1. Apakah secara parsial penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan asli daerah di kota Banjarmasin tahun 2015-2023?
2. Apakah secara simultan penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan asli daerah di kota Banjarmasin tahun 2015-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis secara parsial, apakah penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah di kota Banjarmasin tahun 2015-2023?
2. Untuk menganalisis secara simultan, apakah penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah di kota Banjarmasin tahun 2015-2023?

D. Signifikansi Penelitian

Selain ingin mencapai tujuan, peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis serta praktis:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memperkaya khazanah keilmuan islam dibidang ekonomi syariah, khususnya terkait dengan dampak pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Secara Praktis

- a. Penulis

Dilakukannya penelitian ini untuk menambah pengetahuan penulis mengenai dampak pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin.

b. Akademisi

Temuan dalam penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber referensi oleh kalangan akademisi yang ingin melanjutkan studi terkait pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan, dan melakukan analisis yang lebih mendalam.

c. Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai data pendukung dalam mengevaluasi pelaksanaan pajak daerah Kota Banjarmasin